

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal 7 UU No. 25 tahun 2004 menyebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021.

Renja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

Adapun visi Bupati Banjar adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”**. Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar ini mengacu kepada misi yang tercantum RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021, misi ke 3 yaitu “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan”.

Misi Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2016 - 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengalaman ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah

Sedangkan MISI Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada misi ke 3 (tiga) yaitu:

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah Kabupaten Banjar dan Nasional pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Banjar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar No.12);
11. Peraturan Bupati No.58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Review I Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2021 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kinerja sampai Triwulan III tahun 2021 dan proyeksi capaian akhir tahun berjalan.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar Tahun 2021, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR TRIWULAN III TAHUN 2021

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan III Tahun 2021 dan perkiraan capaian akhir tahun 2021. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANJAR

Berisikan tentang perubahan rencana kerja dan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BANJAR TRIWULAN III TAHUN 2021****2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – SKPD TRIWULAN III TAHUN 2021 DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sampai triwulan III tahun 2021 dan perkiraan target sampai akhir tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi di Empat (4) bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Data dan Informasi,
2. Kajian Dampak Lingkungan
3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Penanganan dan Pengangkutan Sampah
2. Pertamanan, RTH dan Kebersihan Lingkungan
3. Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu :

1. Pemantauan Lingkungan
2. Pengendalian Pencemaran Lingkungan
3. Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan terdiri atas 3 seksi yaitu:

1. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH
2. Penegakan Hukum Lingkungan
3. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Program/Kegiatan**A. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup****1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten /kota**

Capaian Kegiatan	: Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP
Output	: Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 45%
Hasil	: Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sumber pencemar air dan udara lingkungan 107 titik pantau

a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Pada Sub Kegiatan ini terdapat kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan, Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri, Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri, Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara.

Kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran lingkungan merupakan kegiatan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi status pengelolaan lingkungan hidup oleh suatu kegiatan usaha/perusahaan, misalnya Progres pemantauan antisipatif pencemaran lingkungan serta untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi dan Progres yang telah dicapai dalam suatu kegiatan. Sasaran kegiatan Klinik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Program pengendalian Pencemaran Lingkungan hidup di tahun 2021 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Banjar, meliputi pelaku kegiatan usaha (perusahaan). Pada triwulan III ini sudah tercapai 42%

Kinerja pada kegiatan Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan ini adalah memberikan sosialisasi ke pelaku usaha terkait dengan teknis kewajiban pembuatan laporan izin lingkungan dengan target 100 perusahaan pada triwulan III ini sudah tercapai 40 %

Kinerja pada kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang memiliki system IPAL dan/atau yang telah memiliki IPLC dengan target sebanyak 40 perusahaan dan realisasi yang telah tercapai sebanyak 67,50%

Kinerjanya pada kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Sumber Pencemar Udara Di Lingkungan Industri ini adalah jumlah perusahaan yang menghasilkan emisi udara dengan target 20 perusahaan dan realisasi yang tercapai untuk triwulan III sebanyak 10%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Air ini melakukan pemantauan kualitas air adalah dengan cara menguji kualitas air dengan target sebanyak 95 titik pantau dan realisasinya telah mencapai untuk triwulan III sebanyak 80 titik pantau dengan capaian 84%

Kinerjanya pada kegiatan Pemantauan Kualitas Udara ini melakukan pemantau kualitas udara dengan cara menguji kualitas udara dengan target sebanyak 12 titik pantau dan realisasi triwulan III mencapai 8 titik pantau atau 66% pelaksanaan kegiatan pemantauan Kualitas Udara pada tahun 2021 dilakukan di titik pantau lokasi yaitu di Pergudangan Bizpark mewakili kawasan perindustrian, perumahan bunyamin kecamatan kertak hanyar mewakili kawasan permukiman dan halaman depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mewakili kawasan perkantoran. Berikut Target Sub Kegiatan :

Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan : 20 Perusahaan
Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri
Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan : 40 Perusahaan
Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri
Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan : 100 Perusahaan
Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan
Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian : 40 Perusahaan
Pencemaran
Jumlah titik pantau air sungai : 95 titik pantau
Jumlah titik pantau udara : 12 titik pantau



Pemantuan air Desa Aranio



Pemantuan air di Kec. Aluh aluh desa
Sungai musang



Pemantuan udara Passive Sampler di
titik Hal. Perkantoran DLH



Pemantuan udara di Jalan
A.Yani 37.5 km



Pengendalian Pencemaran udara

Pengendalian Pencemaran udara

b. Koodinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah membuat dokumen pengamatan / Penghitungan dampak GRK dengan target kinerja sebanyak 1 dokumen dan sudah terealisasi sebanyak 1 dokumen.

c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium sebagaimana diamanatkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2008 yang telah diperbaharui menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan peraturan menteri negara lingkungan hidup Nomor 06 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan. Sistem manajemen mutu laboratorium terdiri dari 15 persyaratan manajemen, 10 persyaratan teknis dan 3 persyaratan tambahan seperti yang tercantum dalam Permen LH Nomor 06 tahun 2009. Sampai dengan triwulan III, kegiatan ini dalam proses terlaksana dan anggaran utama kegiatan ini dilakukan pengurangan. Berikut Keluaran Kegiatan dan Target :

2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan	: Rata-rata indeks pencemaran air 5,55 IP
Output	: Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar 60%
Hasil	: Terwujudnya Sistem Informasi inventarisasi pemetaan kawasan rawan kerusakan lingkungan 1 Aplikasi

a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Kinerja pada Sub kegiatan ini adalah jumlah komunitas yang terbentuk sebagai agen pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 6 komunitas dan pembuatan 1 Aplikasi. Dalam kegiatan ini berhasil disepakati bahwa kegiatan pengendalian KARHUTLA harus dilaksanakan secara koordinatif dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai panglima dari kegiatan

Pengendalian KARHUTLA Di lapangan. Unsur TNI/POLRI juga terlibat dalam hal teknis untuk mengamankan situasi disaat terjadi KARHUTLA. Selain itu BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga Forum Pengurangan Resiko Bencana Adaptasi Perubahan Iklim (Forum PRB-API Kalsel) dan Manggala Agni akan bekerjasama untuk merumuskan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) untuk kasus KARHUTLA di Kabupaten Banjar. Realisasi triwulan III sudah sebanyak 6 komunitas dan capaian 66%

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan pelaporan lingkungan berupa dokumen dan laporan yang berisi Informasi Lingkungan Hidup yang terhimpun. Sampai triwulan III sedang dilaksanakan penyusunan kajian IKPLHD.

Capaian Kegiatan	: Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan 80%
Output	: Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update 100%
Hasil	: Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun 3 Dokumen

C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1) Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Capaian Kegiatan	: Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan 2.05%
Output	: Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan 2%
Hasil	: Meningkatnya Kenyamanan Ruang Publik Serta Terpeliharanya Taman dan jalur Hijau 31 lokasi

a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

Kinerja yang menunjang Sub kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan ini adalah jumlah lokasi lahan taman kehati dalam kegiatan ini target yang harus terpenuhi sebanyak 1 lokakasi dan terealisasi untuk triwulan III sudah tercapai 1 lokasi.

b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pada kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka (RTH) ini indikator kinerjanya adalah jumlah lokasi RTH yang di pelihara kegiatan yang tercapai adalah 30 lokasi dari target di tahun 2021 dan sudah terealisasi 13 lokasi untuk triwulan III



Pemeliharaan RTH Taman CBS

c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati lainnya

Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati ini adalah untuk mencapai tata pemerintahan dan lingkungan hidup perkotaan yang baik dengan tujuan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sasaran kegiatan ini adalah untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan, membangun partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan di sebut dengan Penghijauan Kawasan Perkotaan & Perdesaan (Gamis Hijau / Urban Farming). Kegiatan ini dengan target 70 lokasi untuk tahun 2021 dan terealisasi sudah 52 lokasi untuk triwulan III.

d. Pengempangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Kinerja yang menunjang kegiatan ini adalah jumlah kawasan Kampung Hijau pada kegiatan ini jumlah target yang harus dicapai adalah sebanyak 1 kampung dan telah mencapai target yg diminta.

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3

- Capaian Kegiatan : Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 50%
- Output : Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 35 Pelaku Usaha
- Hasil : Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 35 Pelaku Usaha

a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Fasilitas Pemenuhan untuk Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target kinerja 35 pelaku usaha yang sudah terlaksana di triwulan III sebanyak 19 pelaku usaha.

b. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah.

Pada Sub Kegiatan ini adalah Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sudah terlaksana di triwulan III sebanyak 19 pelaku usaha.



Verifikasi Limbah B3



Verifikasi Limbah B3

E. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota

- Capaian Kegiatan : Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update 30%
- Output : Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan Lingkungan hidup 55%
- Hasil : Jumlah monitoring dan evaluasi pelaku usaha yang dikenakan sanksi administrasi dan progres verifikasi lapangan pelaksanaan penataan terhadap peraturan LH 45 Pelaku Usaha

a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Pada Sub kegiatan ini indikator kinerjanya adalah jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pelaksanaan kegiatan ini meliputi melaksanakan rapat penapisan dokumen lingkungan terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan arahan dokumen lingkungan, melakukan kegiatan Peninjauan Lapangan dan Rapat Teknis Dokumen

Lingkungan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi kegiatan Pertambangan Batubara, Stockpile, Pertambangan Komoditas Batuan, SPBU, Pergudangan, Perumahan, Kantor & Workshop, IPAL Komunal, Laboratorium, AMDK, Ruko, Klinik dan lain-lain, dan mengeluarkan SK rekomendasi dokumen lingkungan. Target Sub Kegiatan ada 140 Dokumen dan sudah tercapai di triwulan III sebanyak 131 Dokumen.

b. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Kinerja Sub kegiatan ini adalah jumlah perusahaan yang diawasi maka diperlukan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup yang merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam mengelola lingkungan. Target Kinerja dalam Sub kegiatan ini adalah sebanyak 45 perusahaan dan kegiatan ini telah mencapai target yang pada triwulan III yaitu 37 perusahaan factor yang mendukung kegiatan ini adalah karena adanya dokumen lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan dan perusahaan wajib mentaati sesuai isi dokumen.



Pengawasan Izin Lingkungan

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

Pada Sub Kegiatan ini adalah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH dengan target 45 Perusahaan dan sudah tercapai di triwulan III sebanyak 3 Perusahaan.

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan : Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan 60%

Output : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan

Peraturan Lingkungan Hidup 300 Peserta

Hasil : Jumlah Peserta Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup 300 Peserta

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga kemasyarakatan

Pada Sub kegiatan ini adalah Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan Sosialisasi Tata cara pengaduan pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang untuk memberikan edukasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah Peserta Sosialisasi sebanyak 300 orang dan realisasi untuk triwulan III adalah sebanyak 100 orang dengan capaian 33%

b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Pada Sub Kegiatan ini adalah Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan yang dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan pendidikan lingkungan hidup yang diikuti oleh sekolah setingkat SD,SMP,SMA/SMK dengan tujuan untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berwawasan lingkungan juga Sosialisasi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan dimana kegiatan ini menyampaikan informasi, pengetahuan dan wawasan kepada sekolah khususnya tim Adiwiyata sekolah tentang penyusunan dokumen aplikasi sekolah Adiwiyata. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar dengan target kinerja 30 perusahaan dan realisasi untuk triwulan III adalah sebanyak 26 perusahaan dengan capaian 86%.

G. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Capaian Kegiatan : Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan 75%

Output : Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan 75%

Hasil : Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik 20 Kasus

a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini adalah Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang untuk memberikan pelayanan kepada perusahaan dan masyarakat terkait permasalahan lingkungan. Target pada Sub Kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik dengan target kinerja 20 kasus dan realisasi yang tercapai untuk triwulan ke III adalah 9 Kasus pengeduan tingkat capaian kinerja masih 45%



Pengaduan Limbah Produksi Bakso Di Tanjung Rema Darat mencemari sumur warga



Limbah Tambang di Cintapuri mencemari perkebunan karet dan persawahan.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan /atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan

Pada Sub Kegiatan ini adalah fasilitas penyelesaian sengketa yang mana penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Target kinerja pada Sub Kegiatan yaitu Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan sebanyak 20 Kasus. Realisasi kinerja untuk triwulan III 3 kasus yang terselesaikan dengan tingkat capaian 15%.

H. Program Pengelolaan Persampahan**1) Pengelolaan Sampah**

- Capaian Kegiatan : Persentase pengurangan sampah 24%%
 Output : persentase timbulan sampah yang tertangani 74%
 Hasil : Tercapainya Kebersihan di wilayah kecamatan yaitu 11 Kecamatan

a. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini adalah Penyusunan kebijakan pengurangan sampah menyajikan bentuk laporan kebijakan pengurangan sampah sehingga menjadi acuan dalam pelayanan penanganan sampah kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pengurangan sampah di Kabupaten Banjar. Target kinerja pada sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Dokumen. Realisasi kinerja sampai triwulan ke III yaitu belum tercapai pembuatan dokumen masih dalam proses.

b. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota

Pada Sub Kegiatan ini bertambahnya cakupan layanan persampahan setiap tahun maka operasional dalam pengelolaan sampah akan semakin meningkat, agar tidak mengurangi kondisi sarana dan prasarana pengangkutan sampah maka dibutuhkan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target pada sub kegiatan yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara sebanyak 85 unit. Realisasi untuk triwulan III sebanyak 61 unit dengan tingkat capaian 71%

c. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Pada Sub Kegiatan ini belum maksimalnya pengelolaan sampah dalam rumah tangga maka perlu kiranya dilakukan pendekatan ke masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengurangan sampah. Target kinerja yaitu Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan sebanyak 40 komunitas, realisasi untuk triwulan III sudah sebanyak 15 komunitas dengan tingkat capaian 37% dan Koordinasi Kota sehat/ Adipura Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan. Sampai triwulan III, pelaksanaan pekerjaan utama pada kegiatan ini tidak dapat terlaksana. Semula direncanakan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali penilaian, tetapi dengan adanya rasionalisasi anggaran, penilaian tidak dapat dilaksanakan.

d. Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja modal penanganan sampah, seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor dan lainnya mencakup dari Pembangunan TPS 3R, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya seperti Pembuatan Landasan Kontainer di Beruntung Baru. Pada target Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah 14 Paket dan realisasi untuk triwulan III 9 paket tingkat capaian sudah 64%

e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Pengadaan sarana dan prasarana penanganan sampah meliputi pengadaan barang dan jasa baik operasional pendukung maupun belanja

modal penanganan sampah namun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), seperti Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang seperti Dump Truck, Kendaraan Roda Tiga, Arm Roll, dan Kontainer, Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus seperti Mesin Press Hidrolik, Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman seperti Mesin Pencacah. Target pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah sebanyak 6 unit dengan realisasi triwulan III sudah 3 unit tingkat capaian 50%.



2.1.2. Faktor-Faktor Permasalahan dan Solusi Capaian Kinerja Program/Kegiatan Faktor Permasalahan Kinerja

1. Keterbatasan pembiayaan yang bersumber pada pendanaan APBD membuat beberapa kegiatan hanya memprioritaskan kegiatan yang sangat strategis untuk mendukung visi misi Kepala Daerah. Ditambah lagi dengan kebijakan rasionalisasi anggaran sebagai dampak penanganan Covid-19 membuat sebagian kegiatan anggarannya dihilangkan sehingga target yang ingin dicapai pada Renja 2021 tidak dapat direalisasikan.

2. Meningkatnya timbulan sampah sebagai dampak semakin tumbuh dan berkembangnya hunian perumahan dan industri hal ini tidak diiringi dengan penambahan sarana dan prasarana penanganan sampah di Kabupaten Banjar yang tentu dapat mengganggu pelayanan persampahan.
3. Penyedia Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (Presentase tersedia luas RTH publik masih dibawah 20% dari luas wilayah Kabupaten Banjar

Solusi Capaian Kinerja

1. Dengan keterbatasan anggaran dan rasionalisasi anggaran sebagai dampak penanganan Covid-19 maka prioritas pelaksanaan kegiatan lebih difokuskan sesuai anggaran yang tersedia dan dilakukan penjadwalan ulang pada beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana sebagai dampak diberlakukannya pembatasan kerja sesuai dengan protocol Covid-19. Selain itu perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dengan pihak instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan
2. Perlu melakukan pemantauan dan evaluasi dalam perencanaan anggaran khususnya untuk kegiatan kebersihan agar pada saat perencanaan kegiatan dapat diprioritaskan untuk sarana & prasarana kebersihan.
3. Memanfaatkan secara maksimal pengoperasian sarana dan prasarana penanganan sampah berupa dump truk, arm rol, TPS 3R, Bank-bank sampah dan petugas lapangan.
4. Harapannya pada perubahan APBD tahun 2021 dapat disetujui usulan penambahan sarana dan prasarana penanganan sampah dan pemeliharaan serta operasional penanganan sampah melalui dana APBD Kabupaten Banjar.
5. Penambahan anggaran untuk menambah luasan RTH public di Kabupaten Banjar, baik dengan pengadaan tanah maupun sarana dan prasarana RTH.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Triwulan III tahun 2021

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstran Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III								
1	2	4	5	8			9		10		11		13 = 9+10+11+12		13 = 12/7*100		14 = 7 + 13		16
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%		16,513,073,886.00	25%	1,845,395,532	25%		25%		75%	1,845,395,532	75.00	11.18	0.75	1,845,395,532	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	7	Lap.	12,723,500	2	774,000	2	594,500	3	1,570,200	7.00	2,938,700	100.00	23.10	7.00	2,938,700	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7	Lap.	12,723,500	2	774,000	2	594,500	3	1,570,200	7.00	2,938,700	100.00	23.10	7.00	2,938,700	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran	12	Bulan	15,482,671,266.00	3	1,718,739,778	3	2,206,517,681	3	2,053,960,719	9.00	5,979,218,178	75.00	38.62	9.00	5,979,218,178	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12		7,297,511,249							0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	6,844,183,017	3	1,544,559,300	3	1,763,589,314	3	1,759,296,828	9.00	5,067,445,442	75.00	74.04	9.00	5,067,445,442	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12	bulan	1,325,420,000	3	174,180,478	3	441,453,367	3	292,313,891	9.00	907,947,736	75.00	68.50	9.00	907,947,736	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	Dok	8,479,300	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18	Lap.	7,077,700	0	0	7	1,475,000	2	2,350,000	9.00	3,825,000	50.00	54.04	9.00	3,825,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran	12	Bulan	566,740,400	3	60,762,400	3	106,514,942	3	145,434,250	9.00	312,711,592	75.00	55.18	9.00	312,711,592
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	jenis	17,876,200	6	4,452,400	1	2,913,000	2	6,629,300	9	13,994,700	100.00	78.29	9.00	13,994,700
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	jenis	49,558,200	0	0	3	12,590,000	5	34,036,500	8.00	46,626,500	100.00	94.08	8.00	46,626,500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	499,306,000	3	56,310,000	3	91,011,942	3	104,768,450	9.00	252,090,392	75.00	50.49	9.00	252,090,392
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	262,252,720	3	40,153,212	3	55,176,156	3	60,664,660	9.00	155,994,028	75.00	59.48	9.00	155,994,028
		Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4	rekening	166,801,720	4	25,647,812		30,350,056		32,273,160	4.00	88,271,028	100.00	52.92	4.00	88,271,028
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8	jenis	95,451,000	2	14,505,400	2	24,826,100	2	28,391,500	6.00	67,723,000	75.00	70.95	6.00	67,723,000

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran	12	Bulan	188,686,000	3	24,966,142	3	20,989,600	3	38,433,973	9.00	84,389,715	75.00	44.72	9.00	84,389,715	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1	unit	40,990,000	1	13,109,762		12,158,056		7,086,196	1.00	32,354,014	100.00	78.93	1.00	32,354,014	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8	unit	81,236,000	2	10,471,380	2	7,421,544	4	27,237,777	8.00	45,130,701	100.00	55.56	8.00	45,130,701	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28	unit	18,440,000	5	1,385,000	1	1,410,000	12	4,110,000	18.00	6,905,000	64.29	37.45	18.00	6,905,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1	unit	48,020,000	0	0	0	0		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan	85%		140,314,500	0.0%	6,202,200	0.0%		33.0%		33%	6,202,200	38.82	4.42	0.33	6,202,200	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500	0	6,202,200	0	-	1	117,720,100	1.00	123,922,300	33.33	88.32	1.00	123,922,300	
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500	0	6,202,200	0	0	1	117,720,100	1.00	123,922,300	33.33	88.32	1.00	123,922,300	

		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP		1,310,165,100	5.55	11,868,000	5.55	352,082,360	5.55	394,657,170	5.55	758,607,530									
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5.55	point	1,141,790,200	5.55	11,868,000	5.55	352,082,360	5.55	394,657,170	5.55	758,607,530	100.00	66.44	5.55	758,607,530					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	990,553,300		1,568,000	2		45,913,570		2.00	47,481,570	4.79		2.00	47,481,570					
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri		40	perusahaan	7		9		11	27.00		67.50	27.00										
	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan		100	perusahaan					40			0.00	0.00										
	Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran		40	perusahaan	7		5		5	17.00		42.50	17.00										
	Jumlah titik pantau air sungai		95	titik pantau	34		10,300,000		20	350,309,955		26	83,279,200				80.00		443,889,155	84.21	80.00	443,889,155	
	Jumlah titik pantau udara		12	titik pantau	0				4			4	220,810,500				8.00		220,810,500	66.67	8.00	220,810,500	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	66,825,000	0	0	0	0			0.00	0	0	0.00	0.00	0					

	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	84,411,900	0	0		1,772,405	1	44,653,900	1.00	46,426,305	100.00	55.00	1.00	46,426,305	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	poin	168,374,900	5.55	0	5.55	-	5,55	85,788,400	5.55	85,788,400	0.00	50.95	5.55	85,788,400	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	168,374,900	0	0	2	0	2	85,788,400	4.00	85,788,400	66.67	50.95	4.00	85,788,400	
		Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1	Aplikasi		0		0		0.00		0.00						
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2,05%		4,669,101,108	1%	564,000,660	1%	1,108,331,368		1,833,143,952	2%	3,505,475,980	97.56	75.08	0.02	3,505,475,980	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	Persen	4,669,101,108	1%	564,000,660	1%	1,108,331,368		1,833,143,952	2%	3,505,475,980	100.00	75.08	0.02	3,505,475,980	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	69,027,008		0	1			-	1.00	0	100.00	0.00	1.00	0	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4,458,363,700	4	564,000,660	5	1,056,617,768	4	1,833,143,952	13.00	3,453,762,380	43.33	77.47	13.00	3,453,762,380	
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	122,844,500	17	0	17	51,713,600	18	-	52.00	51,713,600	74.29	42.10	52.00	51,713,600	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	18,865,900	0	0	1			-	1.00	0	100.00	0.00	1.00	0	

		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	50%		218,178,400	20%	26,914,320	10%				30.00	26,914,320	6,000.00	12.34	30.00	26,914,320	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	35	Pelaku usaha	218,178,400	9	26,914,320	8				17.00	26,914,320	48.57	12.34	17.00	26,914,320	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	19,683,400	11	0	8	4,780,100	0	4,719,300	19.00	9,499,400	54.29	48.26	19.00	9,499,400	
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	198,495,000	11	26,914,320	8	41,190,420	0	68,871,600	19.00	136,976,340	54.29	69.01	19.00	136,976,340	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	30%		114,684,900	10%	0	15%				25.00	0	8,333.33	0.00	25.00	0	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	Pelaku Usaha	114,684,900	48	0	60				108.00	0	77.14	0.00	108.00	0	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	70,753,700	48	0	60	12,711,500	23	7,299,100	131.00	20,010,600	93.57	28.28	131.00	20,010,600	

		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	19,838,400	0	0	25	7,700,000	12	7,000,000	37.00	14,700,000	82.22	74.10	37.00	14,700,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	24,092,800	0	0	2		1	4,200,000	3.00	4,200,000	6.67	17.43	3.00	4,200,000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan	60%		198,890,800	15%	4,000,000	15%				30%	4,000,000	50.00	2.01	0.30	4,000,000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup	300	Peserta	198,890,800	0	4,000,000	0				0.00	4,000,000	0.00	2.01	0.00	4,000,000
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	81,683,900	0	0	0	0	100	2,954,000	100.00	2,954,000	33.33	3.62	100.00	2,954,000
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	117,206,900	4	4,000,000	6	29,426,000	16	34,811,800	26.00	68,237,800	86.67	58.22	26.00	68,237,800
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%		56,077,500	15%	8,865,100	15%				30%	8,865,100	40.00	15.81	0.30	8,865,100

		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	Persen	56,077,500	15%	8,865,100	15%				30%	8,865,100	40.00	15.81	0.30	8,865,100	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	27,107,500	3	6,572,300	4		2	7,364,000	9.00	13,936,300	45.00	51.41	9.00	13,936,300	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	28,970,000	2	2,292,800		3,600,000	1	10,765,500	3.00	16,658,300	15.00	57.50	3.00	16,658,300	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%		15,376,159,700	10%	2,519,163,551	5%				15%	2,519,163,551	62.50	16.38	0.15	2,519,163,551	
		Pengelolaan Sampah	persentase timbulan sampah yang tertangani	74%	Persen	15,376,159,700	20%	2,519,163,551	20%				0.40	2,519,163,551	54.05	16.38	0.40	2,519,163,551	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	24,252,800	0	10,200,000	0		0	4,524,600	0.00	14,724,600	0.00	60.71	0.00	14,724,600	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	12,453,784,000	19	2,314,600,951	21	3,940,774,667	21	2,831,390,533	61.00	9,086,766,151	71.76	72.96	61.00	9,086,766,151	

	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	184,843,500	5	88,610,000	10	4,046,700	83,270,000	15.00	175,926,700	37.50	95.18	15.00	175,926,700		
		jumlah penilaian adipura	3	kali		0		0	0		0.00		0.00		0.00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14	paket	2,713,279,400	1	105,752,600	1	137,649,500	7	767,314,388	9.00	1,010,716,488	64.29	37.25	9.00	1,010,716,488	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	6	unit	3,867,000,000					3	570,460,000	3.00	570,460,000	50.00	14.75	3.00	570,460,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%		550,000,000	0%	115,815,325	0%				0%	115,815,325	0.00	21.06	0.00	115,815,325	
	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	persentase timbul sampah yang tertangani	24%	persen	550,000,000	0%	115,815,325	0%				0.00	115,815,325	0.00	21.06	0.00	115,815,325	
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550,000,000	0	115,815,325		160,103,433		129,063,894	0.00	404,982,652	0.00	73.63	0.00	404,982,652	
Rata-rata capaian kinerja (%)						55.62	48.77						55.62	48.77				
Predikat Kinerja						R	SR						R	SR				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten tahun berikutnya :																		

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjar 2020

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (IKAx30%)+(IKUx30%) + (ITHx40%)	Indeks	70,90	59,25	83,57	Belum Tercapai
	Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI = \sqrt{\frac{(\frac{A}{M})^2 + (\frac{B}{N})^2}{2}}$	Indeks	41	47,33	100%	Tercapai
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Udara IKLH=100- [(50/0,9)xleu-0,1] $IKU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	Indeks	108	79,80	73,88	Belum Tercapai
	Indeks tutupan lahan	$ITH = 100 - (84,3 -$	persen	66,54	52,8	79,35	Belum Tercapai
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan penyediaan RTH publik	Pengelolaan Sampah		persen	100	88,52	88,52	Belum Tercapai
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rata-rata indeks pencemaran air		IP	5.01	3,61	100%	Tercapai
	Baku mutu parameter udara ambien (NO2)		µg/m3	40	5,62	100%	Tercapai
	Baku mutu parameter udara ambien(SO2)		µg/m3	20	10,19	100%	Tercapai
	Persentase kecamatan pelaksanaan gamis hijau (Gerakan Menanam Hari Kamis Untuk Penghijauan)		Persen	48	35	72,92	Belum Tercapai Karena terkendala Covid-19
Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan		Persen	25%	18%	72%	Belum Tercapai Karena terkendala Covid-19
	Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantuan		Persen	25%	18%	73%	Belum Tercapai Karena terkendala Covid-19
Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentasi Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar		Persen	35%	35%	100%	Tercapai
Program Penataan Sda, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahterah dan barokah serat terpeliharanya hutan, lahan		Persen	20%	20%	100%	Tercapai

	dan keanekaragaman hayati						
	Prsentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri		Persen	20%	20%	100%	Tercapai
Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup		Persen	50%	50%	100%	Tercapai
	Persentase Pelayanan Pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan		Persen	50%	50%	100%	Tercapai
Program Pembinaan & Penataan Di Bidang Lingkungan	Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan		Persen	20%	20%	100%	Tercapai
	Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata		Persen	20%	20%	100%	Tercapai
Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah		Persen	20%	20%	100%	Tercapai
	Persentase Pengurangan Sampah		Persen	20%	20%	100%	Tercapai
Program Pengelolaan Sampah (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA		Persen	100%	100%	100%	Tercapai
Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup	Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/update		Persen	25%	57%	100%	Tercapai
	Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan		Persen	25%	57%	100%	Tercapai
Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau	Jumlah jenis produk yang dihasilkan oleh BLUD Intan Hijau		Produk	7	7	100%	Tercapai
Program Pengelola an Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan		persen	2%	2%	100%	Tercapai
Program Pendukung:							
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		Kegiatan	8	8	100%	Tercapai
Program Peningkatan Sarana dan	Terciptanya Disiplin Aparatur		Kegiatan	7	7	100%	Tercapai

Prasarana Aparatur							
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersusunnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan		Kegiatan	3	3	100%	Tercapai

Sumber : LKJiP Dinas Lingkungan Hidup, 2020

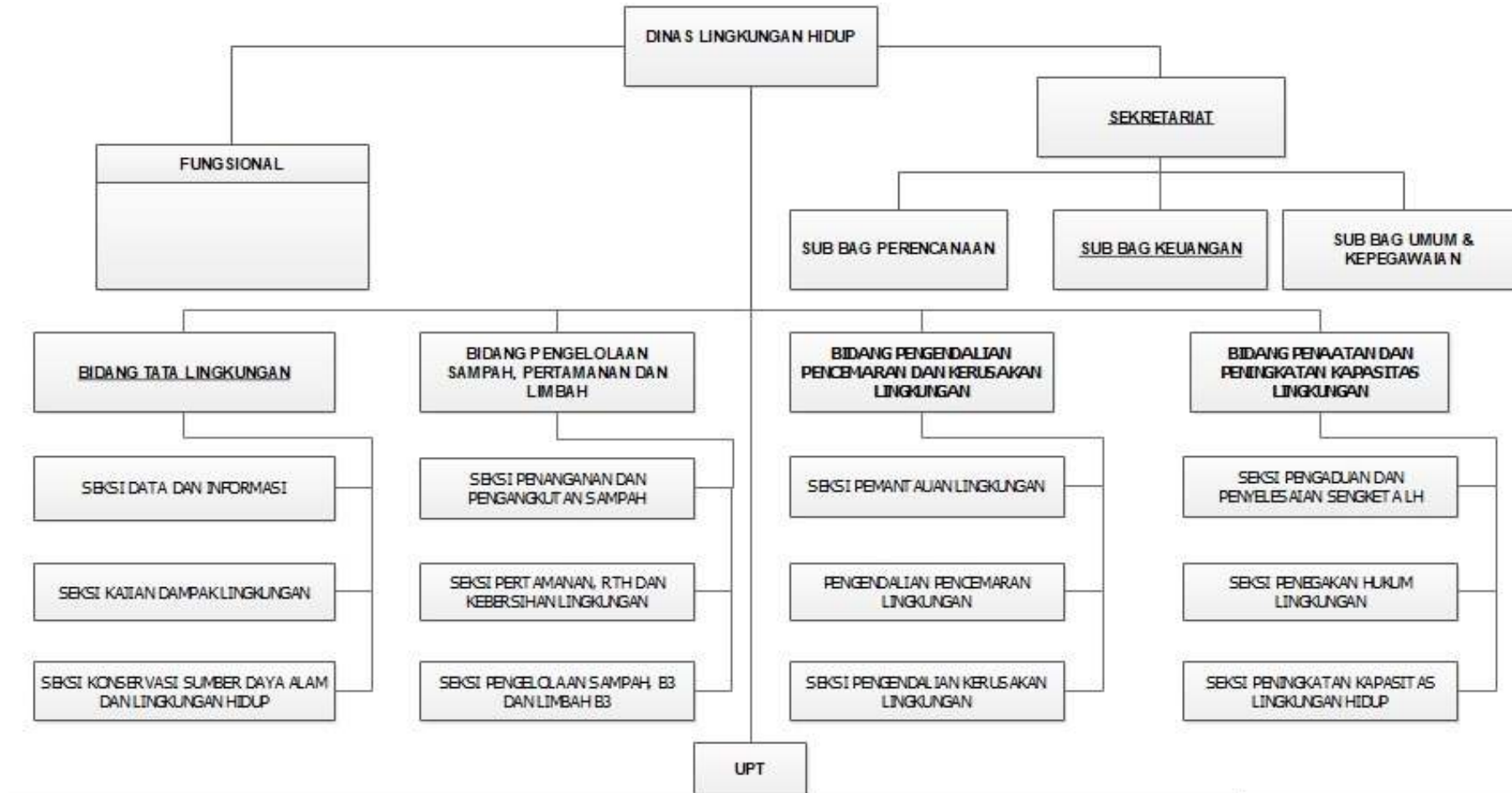
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati No.13 Tahun 2016 pasal 12 (4) disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah B3. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar didalam menyelenggarakan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 64 Tahun 2016 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penataan lingkungan ;
- c. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan lingkungan hidup ;
- d. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang konservasi dan pengelolaan sumber daya alam ;
- e. Pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup ;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- h. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan fungsional

2.2.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar diamanatkan bahwa:

Uraian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penaatandan peningkatan kapasitas lingkungan;
- c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas
- d. pengkoordinasian seluruh kegiatan dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
- e. pengawasan dan pengendalian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- f. penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan Dinas;
- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis dibidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, pertamanan dan limbah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

- i. Perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. Pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas
- k. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan keuangan, umum dan kepegawaian

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas ;
- b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Tata Lingkungan Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan teknis urusan data dan informasi, kajian dampak lingkungan serta konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah

Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- b. pengkoordinasian kegiatan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- d. penyelenggaraan teknis urusan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan penanganan dan pengangkutan sampah, bidang pertamanan, RTH dan kebersihan lingkungan serta bidang pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. penyelenggaraan teknis urusan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;

- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengendalian kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan teknis urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam melaksanakan tugas pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan Analisis permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja yang secara umum dipengaruhi oleh factor – factor internal didapatkan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang menjadi perhatian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Adapun isu – isu tersebut adalah :

- a. Terbatasnya kuantitas dan SDM yang berkompetensi khusus di bidang lingkungan
- b. Tidak adanya pejabat penyidik pada Dinas Lingkungan Hidup
- c. Kurangnya Sosialisasi pencegahan pencemaran air dan udara
- d. Rendahnya pengetahuan masyarakat di bidang persampahan
- e. Sulitnya mengubah budaya masyarakat terhadap pengelolaan sampah
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam pengendalian Lingkungan Hidup

Tabel 2.3 Review Terhadap prioritas daerah dan Perubahan Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode					Rancangan Awal SIPD				Hasil Perubahan				Pagu Indikatif	Catatan		
							Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)	Pagu Indikatif		Program / Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (2021)			Pagu Indikatif	
1	2	3					4	5	6		7	8	9					
									K	Rp.			K	Rp.				
		2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan	85%		140,314,500	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan	85%		140,314,500		
		2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500		
		2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3	Dok	140,314,500		
		2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55	IP	1,425,482,200	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55	IP	1,310,165,100		

		2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5.55	poin	1,257,107,300	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5.55	poin	1,141,790,200
		2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	1,101,717,400	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20	perusahaan	990,553,300
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri		40	perusahaan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri			40	perusahaan		
		2	11	03	2.01	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan		100	perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan			100	perusahaan		
						Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran		40	perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran			40	perusahaan		
						Jumlah titik pantau air sungai		95	titik pantau	Jumlah titik pantau air sungai			95	titik pantau		
						Jumlah titik pantau udara		12	titik pantau	Jumlah titik pantau udara			12	titik pantau		

		2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	66,825,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1	Dok	66,825,000		
		2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	88,564,900	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1	Dok	84,411,900		
		2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	poin	168,374,900	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	poin	168,374,900		
		2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	168,374,900	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6	Komunitas	168,374,900		
							Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1	Aplikasi	Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih			1	Aplikasi				
		2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2,05 %		4,671,126,108	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2,05%		4,669,101,108		
		2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	Persen	4,671,126,108	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	Persen	4,669,101,108		

		2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	69,027,008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1	lokasi	69,027,008		
		2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4,460,388,700	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30	lokasi	4,458,363,700		
		2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	122,844,500	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70	lokasi	122,844,500		
		2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	18,865,900	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1	kampung	18,865,900		
		2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	50%		218,178,400	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	50%		218,178,400		
		2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	35	Pelaku usaha	218,178,400	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	35	Pelaku usaha	218,178,400		

							Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	19,683,400	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	19,683,400
		2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	198,495,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35	pelaku usaha	198,495,000
		2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	30%		114,684,900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	30%		114,684,900

							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	Pelaku Usaha	114,684,900	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	Pelaku Usaha	114,684,900	
		2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	70,753,700	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140	dokumen	70,753,700	
		2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	19,838,400	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	19,838,400	
		2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	24,092,800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45	perusahaan	24,092,800	

		2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan	60%		234,922,400	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan	60%		198,890,800		
		2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup	300	Peserta	234,922,400	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup	300	Peserta	198,890,800		
		2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	81,683,900	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300	orang	81,683,900	
		2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	153,238,500	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30	perusahaan	117,206,900	

		2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%		56,077,500	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%		56,077,500
		2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	Persen	56,077,500	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	Persen	56,077,500
		2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	27,107,500	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20	kasus	27,107,500
		2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	28,970,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20	kasus	28,970,000
		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%		19,258,069,700	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%		15,376,159,700
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	persentase timbulan sampah yang tertangani	74%	Persen	19,258,069,700	Pengelolaan Sampah	persentase timbulan sampah yang tertangani	74%	Persen	15,376,159,700

		2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	25,752,800	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1	Dok	24,252,800
		2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	12,453,784,000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85	unit	12,453,784,000
		2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	198,253,500	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40	komunitas	184,843,500
							jumlah penilaian adipura		3	kali			jumlah penilaian adipura	3	kali	
		2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	20	paket	6,580,279,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14	paket	2,713,279,400
		2	11	11	2.01	07	-	-	-	-	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	6	unit	3,867,000,000

		2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%	persen	550,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%		550,000,000	
		2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	persentase timbulan sampah yang tertangani	24%	persen	550,000,000	Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	persentase timbulan sampah yang tertangani	24%	persen	550,000,000	
		2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550,000,000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1	Tahun	550,000,000	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program Dinas Lingkungan Hidup merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjar dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar pada tahun 2021 akan disampaikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rencana Kerja Periode Tahun 2020-2021

No	Rencana Tahun 2020						Rencana Tahun 2021				
	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Target	Pagu	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan hidup dan Sumber daya	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantuan	35% 25%	1,654,000,000	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemaran Institusi dan Non Institusi Yang telah dilakukan Pembinaan dan Pemantuan		2,068,000,000	

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

			<p>Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Presentase Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar</p>	<p>35%</p>	<p>650,000,000</p>	<p>Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Presentase Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar</p>	<p>812,000,000</p>
			<p>Program Pnaatan SDA, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</p>	<p>1. Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati</p>	<p>28%</p>	<p>650,000,000</p>	<p>Program Pnaatan SDA, Lingkungan & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</p>	<p>1. Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati</p>	<p>812,000,000</p>
				<p>2. Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri</p>	<p>28%</p>			<p>2. Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri</p>	

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

			Program Penegakan Hukum Lingkungan	1. Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	53%		Program Penegakan Hukum Lingkungan	1. Persentase ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	
				2. Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	73%	1,080,000,000		2. Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	1,350,000,000
			Program Pembinaan & Penaatan di Bidang Lingkungan	1. Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan	40%		Program Pembinaan & Penaatan di Bidang Lingkungan	1. Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan	1,312,000,000
				2. Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata	40%	1,049,000,000		2. Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata	

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	6,677,000,000	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	8,346,000,000
			Program Pengelolaan Sampah	1. Persentase Pengurangan Sampah	22%	16,000,000,000	Program Pengelolaan Sampah	1. Persentase Pengurangan Sampah	20,000,000,000
				2. Persentase Penanganan Sampah	75%			2. Persentase Penanganan Sampah	
				3. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	40%			3. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	
		Program Pengelolaan Sampah (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA	100%	15,906,000,000	Program Pengelolaan Sampah (BLUD)	Persentase sampah yang terkelola di TPA	19,882,530,300	

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

			<p>Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup</p> <p>1. Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/Update 28%</p> <p>2. Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan 82%</p>	<p>665,000,000</p>		<p>Program Pengembangan Sistem Informasi & Instrumen Lingkungan Hidup</p> <p>1. Persentase Database Informasi Lingkungan yang valid/Update 2. Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan</p>	<p>832,000,000</p>
			<p>Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana administrasi, promosi dan pengembangan usaha BLUD 8 Produk</p>	<p>650,500,000</p>		<p>Program Peningkatan dan Pengembangan BLUD Intan Hijau</p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana administrasi, promosi dan pengembangan usaha BLUD</p>	<p>750,500,000</p>

3.2. KONDISI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan Perubahan anggaran APBD 2021 sebagai dampak wabah covid-19 yang terjadi di Kabupaten Banjar berakibat berkurangnya anggaran pada 12 (dua belas) Sub Kegiatan, sedangkan jumlah program pada Dinas Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada dinas lingkungan hidup, yaitu:

Tabel 3.2

Kondisi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	PAGU PERUBAHAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,215,562,637.00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12,723,500.00	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,723,500.00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,185,160,017.00	
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	6,844,183,017.00	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,325,420,000.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,479,300.00	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7,077,700.00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		566,740,400.00	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,876,200.00	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49,558,200.00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499,306,000.00	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		262,252,720.00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,801,720.00	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,451,000.00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		188,686,000.00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,990,000.00	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81,236,000.00	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,440,000.00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,020,000.00	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			140,314,500.00	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		140,314,500.00	
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	140,314,500.00	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,141,790,200.00	

		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1,141,790,200.00	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	990,553,300.00	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	66,825,000.00	
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	84,411,900.00	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		168,374,900.00	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	168,374,900.00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)			4,669,101,108.00	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		4,669,101,108.00	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	69,027,008.00	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,458,363,700.00	
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	122,844,500.00	

			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	18,865,900.00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			218,178,400.00	
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		218,178,400.00	
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19,683,400.00	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	198,495,000.00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			114,684,900.00	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		114,684,900.00	

			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70,753,700.00	
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,838,400.00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24,092,800.00	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			198,890,800.00	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		198,890,800.00	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	81,683,900.00	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	117,206,900.00	
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			56,077,500.00	
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		56,077,500.00	

			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	27,107,500.00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	28,970,000.00	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			19,243,159,700.00	
		Pengelolaan Sampah		19,243,159,700.00	
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	24,252,800.00	
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12,453,784,000.00	
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	184,843,500.00	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2,713,279,400.00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3,867,000,000.00	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			550,000,000.00	
		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau		550,000,000.00	

			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	550,000,000.00	
--	--	--	--	----------------	--

3.3. PERUBAHAN TARGET KINERJA

Dengan adanya Perubahan Anggaran tetapi untuk target kinerja tidak adanya perubahan . Adapun rincian perubahan tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.

Usulan Perubahan Target Kinerja Pada Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
					Awal	Perubahan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	100%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	7 Laporan	7 Laporan
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7 Laporan	7 Laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	18 Lap.	18 Lap.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8 Jenis	8 Jenis
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	1 unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 unit	8 unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28 unit	28 unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit
2.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan	85%	85%

		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dok	3 Dok
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dok	3 Dok
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20 Perusahaan	20 Perusahaan
				Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	40 Perusahaan	40 Perusahaan
				Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	100 Perusahaan	100 Perusahaan
				Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	40 Perusahaan	40 Perusahaan
				Jumlah titik pantau air sungai	95 titik pantau	95 titik pantau
				Jumlah titik pantau udara	12 titik pantau	12 titik pantau

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1 Dokumen	1 Dokumen
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1 Dokumen	1 Dokumen
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6 Komunitas	6 Komunitas
				Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1 Aplikasi	1 Aplikasi
4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2.05%	2.05%
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	2%
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1 lokasi	1 lokasi
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30 lokasi	30 lokasi
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70 lokasi	70 lokasi
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1 Kampung	1 Kampung

5.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	50%	50%
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	35 pelaku usaha	35 pelaku usaha
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35 Pelaku usaha	35 Pelaku usaha
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35 Pelaku usaha	35 Pelaku usaha
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	30%	30%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140 pelaku usaha	140 pelaku usaha
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140 Dokumen	140 Dokumen

			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45 perusahaan	45 perusahaan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45 perusahaan	45 perusahaan
7.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan	60%	60%
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup	300 peserta	300 peserta
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 orang	300 orang
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30 perusahaan	30 perusahaan
8.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	75%

		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	75%
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20 kasus	20 kasus
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20 kasus	20 kasus
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase pengurangan sampah	24%	24%
		Pengelolaan Sampah		persentase timbulan sampah yang tertangani	74%	74%
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85 unit	85 unit
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40 Komunitas	40 Komunitas
				jumlah penilaian adipura	3 kali	3 kali
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14 paket	14 paket
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	6 unit	6 unit

10.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase pengurangan sampah	24%	24%
		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau		persentase timbulan sampah yang tertangani	24%	24%
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1 Tahun	1 Tahun

3.4. USULAN PERUBAHAN ANGGARAN

Kondisi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar tahun 2021 masih jauh dari harapan, sedangkan untuk menangani masalah lingkungan di Kabupaten Banjar yang cukup luas.

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Banjar, strategi yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengelolaan persampahan. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana persampahan dapat melalui penambahan sarana dan prasarana. Sedangkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana persampahan yaitu dengan menambah anggaran operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Penambahan kuantitas dan kualitas seyogyanya diiringi dengan penambahan anggaran, hal ini disebabkan kondisi sarana dan prasarana persampahan sebagian besar kondisinya sudah tua dengan pengadaan barangnya sebelum tahun 2015. Sehingga untuk memaksimalkan operasional sarana dan prasana tersebut perlu didukung dengan biaya perawatan dan spare part.

Cakupan wilayah pelayanan pengangkutan sampah tiap tahunnya ditambah seiring dengan tumbuhnya lokasi hunian di Kabupaten Banjar. Sehingga mobilitas armada angkut semakin meningkat dan diiringi dengan meningkatnya kebutuhan BBM operasional pengangkutan sampah.

Dengan meningkatnya jumlah timbulan dan penanganan sampah di Kabupaten Banjar, berdampak pada kemampuan kapasitas TPA Cahaya Kencana. Sehingga untuk menyangga *over capacity* tersebut, TPA Cahaya Kencana bekerja sama dengan TPA Regional Banjarbakula sebagai tempat pemrosesan akhir. Hal ini tentunya menambah pengeluaran karena setiap kali pengangkutan ke TPA regional dikenakan biaya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Adapun usulan pengurangan anggaran di APBD Perubahan 2020 dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pengurangan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Sub Kegiatan	Pagu		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
				Indikatif	Perubahan	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,288,288,069	9,215,562,637	(1,072,725,432)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18,221,600	12,723,500	(5,498,100)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,221,600	12,723,500	(5,498,100)
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8,677,762,349	8,185,160,017	(492,602,332)
			Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	7,297,511,249	6,844,183,017	(453,328,232)
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,359,420,000	1,325,420,000	(34,000,000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,753,400	8,479,300	(5,274,100)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7,077,700	7,077,700	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,126,965,400	566,740,400	(560,225,000)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17,876,200	17,876,200	-
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,783,200	49,558,200	(10,225,000)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,049,306,000	499,306,000	(550,000,000)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		262,252,720	262,252,720	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,801,720	166,801,720	-

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95,451,000	95,451,000	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		203,086,000	188,686,000	(14,400,000)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,990,000	40,990,000	-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,636,000	81,236,000	(14,400,000)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,440,000	18,440,000	-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,020,000	48,020,000	-
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			140,314,500	140,314,500	-
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		140,314,500	140,314,500	-
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	140,314,500	140,314,500	-
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,425,482,200	1,310,165,100	(115,317,100)
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		1,257,107,300	1,141,790,200	(115,317,100)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1,101,717,400	990,553,300	(111,164,100)

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	66,825,000	66,825,000	-
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	88,564,900	84,411,900	(4,153,000)
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		168,374,900	168,374,900	-
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	168,374,900	168,374,900	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			4,671,126,108	4,669,101,108	(2,025,000)
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		4,671,126,108	4,669,101,108	(2,025,000)
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	69,027,008	69,027,008	-

			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,460,388,700	4,458,363,700	(2,025,000)
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	122,844,500	122,844,500	-
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	18,865,900	18,865,900	-
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			218,178,400	218,178,400	-
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		218,178,400	218,178,400	-
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	19,683,400	19,683,400	-
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	198,495,000	198,495,000	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			114,684,900	114,684,900	-

		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		114,684,900	114,684,900	-
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	70,753,700	70,753,700	-
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,838,400	19,838,400	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	24,092,800	24,092,800	-
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			234,922,400	198,890,800	(36,031,600)
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		234,922,400	198,890,800	(36,031,600)
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	81,683,900	81,683,900	-
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	153,238,500	117,206,900	(36,031,600)
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			56,077,500	56,077,500	-

		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		56,077,500	56,077,500	-
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	27,107,500	27,107,500	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	28,970,000	28,970,000	-
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			19,258,069,700	19,243,159,700	(14,910,000)
		Pengelolaan Sampah		19,258,069,700	19,243,159,700	(14,910,000)
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	25,752,800	24,252,800	(1,500,000)
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	12,453,784,000	12,453,784,000	-
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	198,253,500	184,843,500	(13,410,000)
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6,580,279,400	2,713,279,400	(3,867,000,000)
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	3,867,000,000	3,867,000,000
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			550,000,000	550,000,000	-

		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau		550,000,000	550,000,000	-
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	550,000,000	550,000,000	-
	TOTAL			36,957,143,777	35,716,134,645	berkurang (1,241,009,132)

Dari ketiga tabel di atas dirangkum menjadi rumusan rencana perubahan tujuan, sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten banjar pada dinas lingkungan hidup, yaitu:

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Perubahan Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Pada Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target		Pagu			Alasan Perubahan			
			Renja 2021	Perubahan Renja 2021	Renja 2021	Perubahan Renja 2021	Jumlah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.288.288.069	9.215.562.637	(1.072.725.432)				
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	100%	100%	18.221.600	12.723.500	(5.498.100)		
2	11	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja	7 Laporan	7 Laporan	18.221.600	12.723.500	(5.498.100)	
2	11	01	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	7 Laporan	7 Laporan	18.221.600	12.723.500	(5.498.100)
2	11	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi keuangan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8.677.762.349	8.185.160.017	(492.602.332)	

2	11	01	2,02	1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	7.297.511.249	6.844.183.017	(453.328.232)
2	11	01	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.359.420.000	1.325.420.000	(34.000.000)
2	11	01	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.753.400	8.479.300	(5.274.100)
2	11	01	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran	18 Lap.	18 Lap.	7.077.700	7.077.700	-
2	11	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	1.126.965.400	566.740.400	(560.225.000)
2	11	01	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	9 Jenis	17.876.200	17.876.200	-
2	11	01	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis	59.783.200	49.558.200	(10.225.000)
2	11	01	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	1.049.306.000	499.306.000	(550.000.000)
2	11	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	262.252.720	262.252.720	-

2	11	01	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 rekening	4 rekening	166.801.720	166.801.720	-
2	11	01	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8 Jenis	8 Jenis	95.451.000	95.451.000	-
2	11	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	203.086.000	188.686.000	(14.400.000)
2	11	01	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	1 unit	40.990.000	40.990.000	-
2	11	01	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 unit	8 unit	95.636.000	81.236.000	(14.400.000)
2	11	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	28 unit	28 unit	18.440.000	18.440.000	-
2	11	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	1 unit	48.020.000	48.020.000	-

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan	85,00%	85,00%	140.314.500	140.314.500	-
2	11	02	2,01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dok	3 Dok	140.314.500	140.314.500	-
2	11	02	2,01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Lingkungan Hidup yang tersusun	3 Dok	3 Dok	140.314.500	140.314.500	-
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP	1.257.107.300	1.141.790.200	(115.317.100)
2	11	03	2,01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP	1.257.107.300	1.141.790.200	(115.317.100)
2	11	03	2,01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Emisi Udara Di Lingkungan Industri	20 Perusahaan	20 Perusahaan	1.101.717.400	990.553.300	(111.164.100)
						Jumlah Pelaku Usaha Yang Telah dilakukan Pembinaan Dan Pemantauan Sumber Pencemar Air Di Lingkungan Industri	40 Perusahaan	40 Perusahaan			

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

					Jumlah Perusahaan yang mengikuti Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Kewajiban Pembuatan Laporan Izin Lingkungan	100 Perusahaan	100 Perusahaan				
					Jumlah Perusahaan Yang Terlayani oleh Klinik Pengendalian Pencemaran	40 Perusahaan	40 Perusahaan				
					Jumlah titik pantau air sungai	95 titik pantau	95 titik pantau				
					Jumlah titik pantau udara	12 titik pantau	12 titik pantau				
2	11	03	2,01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengamatan / penghitungan Dampak GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	66.825.000	66.825.000	-
2	11	03	2,01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Mutu Laboratorium	1 Dokumen	1 Dokumen	88.564.900	84.411.900	(4.153.000)
2	11	03	2,02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rata-rata indeks pencemaran air	5,55 IP	5,55 IP	168.374.900	168.374.900	-
2	11	03	2,02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Komunitas yang terbentuk sebagai agen	6 Komunitas	6 Komunitas	168.374.900	168.374.900	-

					Jumlah Perusahaan yang mendapat pendampingan dalam implementasi Konsep Produksi Bersih	1 Aplikasi	1 Aplikasi				
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2,05%	2,05%	4.671.126.108	4.669.101.108	(2.025.000)
2	11	04	2,01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	2%	2%	4.671.126.108	4.669.101.108	(2.025.000)
2	11	04	2,01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Lokasi Lahan Taman Kehati	1 lokasi	1 lokasi	69.027.008	69.027.008	-
2	11	04	2,01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara	30 lokasi	30 lokasi	4.460.388.700	4.458.363.700	(2.025.000)
2	11	04	2,01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Lokasi Penghijauan di Perkotaan dan Pedesaan	70 lokasi	70 lokasi	122.844.500	122.844.500	-
2	11	04	2,01	6	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kawasan Kampung Hijau	1 Kampung	1 Kampung	18.865.900	18.865.900	-
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	50%	50%	218.178.400	218.178.400	-

2	11	05	2,01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tercapainya pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3	35 pelaku usaha	35 pelaku usaha	218.178.400	218.178.400	-	
2	11	05	2,01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35 Pelaku usaha	35 Pelaku usaha	19.683.400	19.683.400	-	
2	11	05	2,01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin TPS Limbah B3	35 Pelaku usaha	35 Pelaku usaha	198.495.000	198.495.000	-	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	30%	30%	114.684.900	114.684.900	-	
2	11	06	2,01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140 pelaku usaha	140 pelaku usaha	114.684.900	114.684.900	-	
2	11	06	2,01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan	140 Dokumen	140 Dokumen	70.753.700	70.753.700	-	

2	11	06	2,01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45 perusahaan	45 perusahaan	19.838.400	19.838.400	-
2	11	06	2,01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Perusahaan yang diawasi	45 perusahaan	45 perusahaan	24.092.800	24.092.800	-
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kepala keluarga yang peduli lingkungan	60%	60%	234.922.400	198.890.800	(36.031.600)
2	11	8	2,01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat akan Peraturan Lingkungan Hidup	300 peserta	300 peserta	234.922.400	198.890.800	(36.031.600)
2	11	8	2,01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi	300 orang	300 orang	81.683.900	81.683.900	-

2	11	8	2,01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kajian Teknis yang terbentuk dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	30 perusahaan	30 perusahaan	153.238.500	117.206.900	(36.031.600)
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	75%	56.077.500	56.077.500	-
2	11	10	2,01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	75%	75%	56.077.500	56.077.500	-
2	11	10	2,01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat terlayani dengan baik	20 kasus	20 kasus	27.107.500	27.107.500	-
2	11	10	2,01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Kasus sengketa lingkungan hidup dapat terselesaikan	20 kasus	20 kasus	28.970.000	28.970.000	-
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%	24%	19.258.069.700	19.243.159.700	(14.910.000)

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah	persentase timbulan sampah yang tertangani	74%	74%	19.258.069.700	19.243.159.700	(14.910.000)	
2	11	11	2,01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Status Kepuasan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	25.752.800	24.252.800	(1.500.000)	
2	11	11	2,01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	85 unit	85 unit	12.453.784.000	12.453.784.000	-	
2	11	11	2,01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok/Komunitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan	40 Komunitas	40 Komunitas	198.253.500	184.843.500	(13.410.000)	
					Jumlah penilaian adipura	3 kali	3 kali					
2	11	11	2,01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	14 paket	14 paket	6.580.279.400	2.713.279.400	(3.867.000.000)	berkurang karena adanya dana DAK yang di pindah ke sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	11	11	2,01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	-	6 unit	-	3.867.000.000	3.867.000.000	penambahan sub kegiatan karena untuk Dana DAK

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA)**

2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	24%	24%	550.000.000	550.000.000	-	
2	11	11	2,01		Pengelolaan Sampah dan Air Limbah - BLUD Intan Hijau	persentase timbulan sampah yang tertangani	24%	24%	550.000.000	550.000.000	-	
2	11	11	2,01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Terlaksananya Operasional BLUD	1 Tahun	1 Tahun	550.000.000	550.000.000	-	

BAB V P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan dan evaluasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Dalam Perubahan Renja tahun 2021 diharapkan dapat diakomodir perubahan target kinerja serta usulan perubahan anggaran sebagai akibat dari kebutuhan di masyarakat, terutama dalam hal pelayanan pengangkutan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjar.

Tentunya dengan usulan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan berakibat terjadinya penambahan belanja daerah dan semua usulan tidak dapat terakomodir. Akan tetapi dengan disusunnya Perubahan Renja 2021 diharapkan dapat memberi gambaran bahwa anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 yang belum berjalan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.